

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhan akan hidupnya tanpa pertolongan manusia lain. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa manusia lain.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat. Disatu sisi terdapat masyarakat yang kelebihan dana namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain terdapat kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha, namun terhambat oleh dana karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana untuk debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Matroji, "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Karyawan Permatabank, Dihubungkan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam," Jurnal Surya Kencana Dua, Volume 4 Nomor 1 (Juli, 2017), hal. 20

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 1

Oleh karena itu, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.<sup>3</sup>

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dapat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut melalui penyaluran pinjaman. Sebab koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peran Koperasi sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi rakyat, selain itu juga sebagai salah satu alat pemerintah dalam mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaan dan eksistensi koperasi sebagai salah satu badan usaha telah dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perkoperasian.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan juga sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah harus semakin dikembangkan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 4

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.<sup>4</sup>

Landasan yuridis keberadaan koperasi dapat dilihat pada bab XIV (Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut menempatkan koperasi dalam kedudukan baik sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

---

<sup>4</sup> Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 171-172

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 157

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Selanjutnya Mohammad Hatta mengemukakan bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>6</sup>

Mengenai jenis koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Produsen.<sup>7</sup> Sedangkan untuk kegiatan penyaluran pinjaman dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 162-163

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 181

masyarakat umum. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya.<sup>8</sup>

Anggota koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dalam melakukan pinjam meminjam uang saling mengadakan perjanjian pinjam meminjam yang kemudian menimbulkan perikatan. Perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

Pada Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menyiratkan bahwa dari suatu perjanjian maka akan lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>9</sup>

Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Obyek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan obyek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang

---

<sup>8</sup> Matroji, *Op. Cit.*, hal. 23-24

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 13

habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.<sup>10</sup> Secara yuridis, perjanjian pinjam meminjam yang obyek perjanjiannya adalah uang diatur dalam Pasal 1756 KUH Perdata.

Setelah pinjam meminjam uang tersebut disepakati oleh kedua pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi utang dengan anggota koperasi yang bertindak sebagai debitur atau penerima utang, maka lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang yang akan mengikat kedua belah pihak yang kemudian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan.

Kewajiban bagi kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan haknya adalah untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur pada waktu sebagaimana yang tercantum diperjanjian, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian pinjaman tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur.<sup>11</sup>

Permasalahan tidak akan muncul apabila kedua pihak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang salah satu diantara kedua pihak tersebut mengingkari suatu hal yang telah diperjanjikan yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang lain. Dalam perjanjian pinjam meminjam, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila debitur

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 10

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 1-2

melakukan cidera janji berupa lalai dalam mengembalikan pinjaman uang pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Oleh karena itu, dalam hal ini kreditur sangat membutuhkan perlindungan hukum agar haknya untuk mendapatkan pengembalian uangnya dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha dengan anggota Koperasi mempunyai tanggung jawab hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Munir Fuady tentang teori tanggung jawab, bahwa teori tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap digugat karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pada si pelaksana kewajiban itu.<sup>12</sup>

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka muncul tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA**

---

<sup>12</sup> Nunuk Listyowati, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum,” *Jurnal Spirit Pro Patria*, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2015), hal. 30

## **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHINA USAHA CABANG WIDODAREN KABUPATEN NGAWI”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.



2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dan upaya penyelesaiannya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik bagi penulis, masyarakat maupun ilmu hukum sebagai berikut :

##### **1. Bagi Penulis**

Dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum. Selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum perdata khususnya mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam bhina usaha cabang widodaren kabupaten ngawi.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat umum terkait dengan kegiatan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam bhina usaha cabang widodaren kabupaten ngawi dan masyarakat umum dapat jauh lebih memahami proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi simpan pinjam

khususnya di koperasi simpan pinjam cabang widodaren kabupaten ngawi.

### 3. Bagi Ilmu Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran serta menambah referensi dan literature dalam dunia kepustakaan guna perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai kegiatan pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam dan tanggung jawab hukumnya.

## E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan Doktrinal yang bersifat Normatif. Karena Penulis akan melakukan penelitian tentang asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.18

pada koperasi simpan pinjam, dengan mendasarkan pada data-data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan menelaah teori-teori pada berbagai bahan pustaka atau literatur. Serta menggunakan data primer sebagai data penjas yang wujudnya didapat dari observasi maupun wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan secara detail fenomena yang ada mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam bhina usaha cabang widodaren kabupaten ngawi. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan jelas untuk kemudian dapat menemukan pemecahan dari permasalahan tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam bhina usaha cabang widodaren kabupaten ngawi.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### a. Penelitian Kepustakaan

Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.<sup>15</sup> Berupa naskah publikasi tentang hukum meliputi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

b. Penelitian Lapangan

Data Primer diperoleh langsung dari akta perjanjian dan wawancara, dengan rincian sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren, Ngawi. Pengambilan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa sumber

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 18

<sup>15</sup> *Ibid.*

data di lokasi penelitian tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

## 2) Subjek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah Anggota Koperasi yang melakukan pinjam meminjam uang dan juga Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan penjelasan sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan semua peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam.

### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### 1) Observasi

Dengan melakukan penelitian secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi, untuk mendapatkan data yang menyeluruh tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat melihat keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan

### 2) Wawancara

Dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Menyusun sejumlah pertanyaan kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi, sehingga memperoleh keterangan dan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam. Setelah itu data sekunder tadi dipadukan dengan data primer yang berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis. Hasil dari analisis tersebut kemudian

disajikan secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan atas jawaban permasalahan tersebut.

## **F. Sistematika Laporan Penelitian**

Penulis menyusun penelitian ini secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- D. Peraturan yang Mengatur Tanggung Jawab Hukum
- E. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- F. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Pinjam Meminjam Uang

- G. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
- I. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. Ganti Rugi
- K. Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi
- B. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Melaksanakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi
- C. Tanggung Jawab Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**